

PERAN PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Suriyanti¹ Alma Aprilah Risnawati²

^{1,2}Universitas Muslim Indonesia

Email: suriyanti.mangkona@umi.ac.id¹ almaaprilahr@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap keterbukaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Takalar. Populasi penelitian ini adalah Kepala Bagian, Bagian, dan Sub Bagian, Bendahara Pengeluaran dan pegawai pada masing-masing SKPD yang membidangi Laporan Keuangan, yang berjumlah 34 SKPD sebagai unit analisis. Untuk memperoleh sampel sebanyak 85 orang pegawai, digunakan teknik stratified random sampling. Berdasarkan hasil analisis uji-t diperoleh nilai t hitung sebesar $4,291 > t$ tabel 1,989 untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan $5,452 > t$ tabel 1,989 untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Hasil analisis uji F menunjukkan bahwa F hitung = 61,628 lebih besar dari F tabel = 3,96, yang menunjukkan bahwa aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan daerah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Takalar. Mengingat bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah menghasilkan nilai beta standar yang lebih besar yaitu 0,497 dan nilai beta standar yang lebih kecil yaitu 0,391, maka aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh yang paling besar terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Takalar.

Kata kunci: laporan keuangan, pengelolaan keuangan, keuangan daerah, pegawai

Abstract

This study aims to find out and evaluate the influence of accessibility and presentation of regional financial statements on the openness of regional financial management in Takalar Regency. The population of this study is the Head of Section, Section, and Sub-Division, the Expenditure Treasurer and employees in each SKPD in charge of Financial Statements, which totals 34 SKPD as an analysis unit. To obtain a sample of 85 employees, a stratified random sampling technique was used. Based on the results of the t-test analysis, a calculated t-value of $4.291 > t$, table 1.989 for the variable of regional financial report presentation (X1) and $5.452 > t$, table 1.989 for the variable of regional financial report accessibility (X2), which shows that the transparency of regional financial management in the Regional Government of Takalar Regency is positively and significantly influenced by the presentation and accessibility of regional financial statements. The results of the analysis of the F test showed that F count = 61.628 was greater than F table = 3.96, which showed that the accessibility and presentation of regional financial statements together had a significant and positive influence on the transparency of regional financial management of the Takalar Regency Government. Given that the accessibility of regional financial statements results in a larger standard beta value of 0.497 and a smaller standard beta value of 0.391, the accessibility of regional financial statements has the greatest influence on the transparency of regional financial management of the Takalar Regency Government.

Keywords: financial statements, financial management, regional finance, employees

PENDAHULUAN

Desakan transparansi keuangan dalam satu dekade terakhir makin menguat karena beberapa faktor. Faktor pertama ialah tuntutan publik untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja publik. Publik semakin sadar bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah termasuk kebijakan belanja harus mendapat pengawasan ketat, karena hanya

dengan pengawasan yang baik pemerintah semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan belanja. Faktor kedua, bahwa warga semakin sadar untuk berperan dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi. Faktor ketiga, transparansi keuangan juga semakin dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi. Penyajian informasi kepada publik banyak dipermasalahkan karena tingginya biaya untuk memproduksi informasi. Faktor keempat ialah ditetapkannya perundangan tentang keterbukaan informasi publik - KIP (UU 14/2008). Lahirnya undang-undang tentang KIP semakin memperjelas kebijakan Negara untuk melaksanakan transparansi informasi. Faktor kelima ialah kebebasan menyatakan pendapat. Dengan semakin luasnya kebebasan menyatakan pendapat, maka diperkirakan warga yang sadar dan menuntut hak memperoleh informasi akan semakin meningkat di masa yang akan datang.

Namun, terlihat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan kemajuan signifikan membaiknya opini audit BPK selama ini, merupakan modal yang kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar?, Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar?, Apakah penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar?

Hani Nurhayani (2013). Penelitian berjudul Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemko Bandung. Variabel penelitian terdiri atas penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ni Kadek Alit Apriliani I, Edy Sujana dan Gede Adi Yuniarta (2015). Penelitian berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). Variabel penelitian terdiri atas penyajian laporan keuangan (X_1), karakteristik kualitatif (X_2), aksesibilitas (X_3), transparansi laporan keuangan (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara parsial maupun secara simultan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pembuatan *financial statement* oleh suatu perusahaan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun beberapa tujuan umum pembuatan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Untuk membantu perusahaan dalam menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan.

3. Untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan

Pada dasarnya *financial statement* berfungsi sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam menilai kondisi keuangan perusahaan secara umum. Adapun beberapa fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Bahan Review
2. Sebagai Pedoman Membuat Keputusan
3. Membantu Menciptakan Strategi Baru
4. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan

Penyajian laporan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan penyajian laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan yang memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini diadopsi dari Hanim (2009) yang berlandaskan pada PP No.71 tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan bahwa karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat Dibandingkan
- d. Dapat Dipahami

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Menurut Mardiasmo (2002) dalam Peggy Sande (2013), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Indikator aksesibilitas laporan keuangan daerah yaitu :

- a. Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
- b. Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah
- c. Accesible yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet

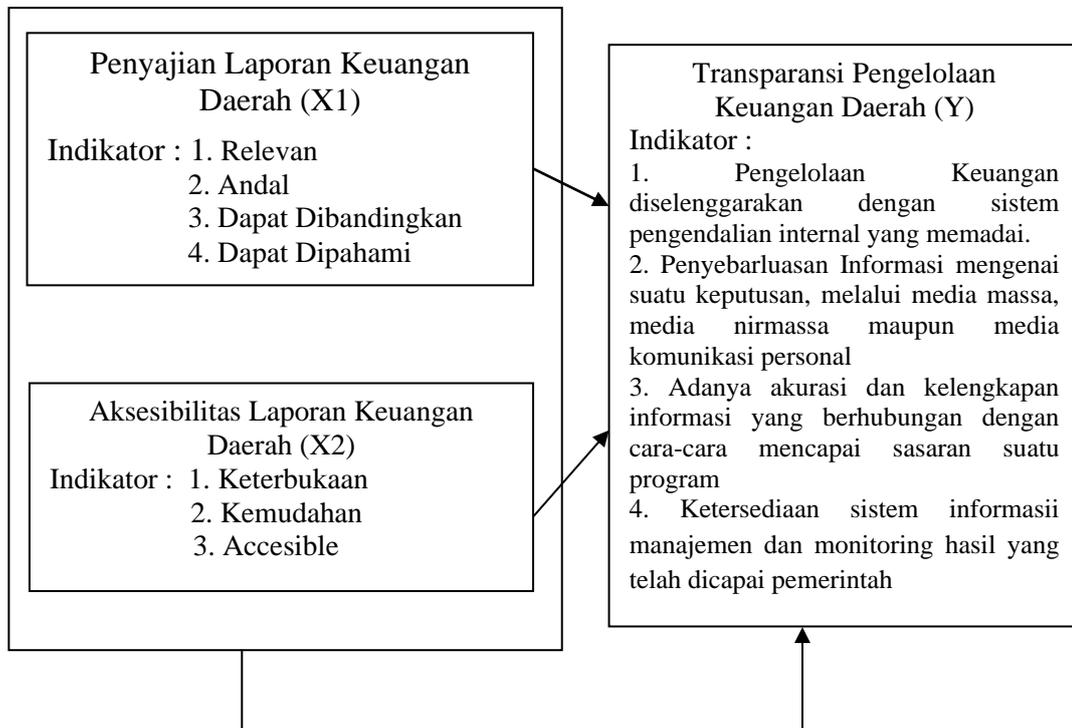
Definisi transparansi menurut Krina P (2003 : 9) adalah “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Pengelolaan Keuangan diselenggarakan dengan sistem pengendalian internal yang memadai.
- b. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.

- c. Adanya akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.

adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:



Hipotesis Penelitian

- H₁ : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar.
- H₂ : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar.
- H₃ : Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal. “Desain Kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain” (Umar, 2003 : 30).

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang ada maka penelitian ini termasuk penelitian *design cross sectional* yaitu penelitian yang melibatkan perhitungan sampel untuk digeneralisir populasinya, melalui inferensial dimana variabel diteliti pada waktu yang bersamaan

Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2023.

Penelitian ini menggunakan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit analisis sebanyak 34 SKPD dan populasi dalam penelitian ini hanya mengambil dua SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar yang terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Bendahara Pengeluaran dan Staf di masing-masing SKPD tersebut yang jumlahnya sebesar 108 pegawai.

Sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* dan dalam menentukan jumlah sampelnya menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 85 pegawai.

Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil kuisioner yang telah diisi oleh responden, yaitu Kabid dan Kasubag dari masing-masing SKPD yang menjadi sampel penelitian.
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu catatan, ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuisioner yaitu memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) poin skala Likert. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert yaitu dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, objek, atau kejadian (Kuncoro, 2003 : 157).

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan reliabilitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Ancok, 2008 : 120).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian :

- (a) Uji Normalitas
- (b) Uji Multikolinieritas
- (c) Uji heterokedastisitas

Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini pendekatan analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis linear berganda. Metode analisis linear berganda digunakan untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel dependen tersebut.

a. Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dikenal juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Adjusted R²

Pengujian *adjusted R²* digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Responden

Kuesioner yang disebarakan dalam penelitian ini berjumlah 85 kuesioner yang dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan masa kerja pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Deskripsi Variabel Penelitian

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X₁)

Tabel 1. distribusi frekuensi penyajian laporan keuangan daerah

No	Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Laporan keuangan Pemda Takalar memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.	0	0	0	0	0	0	44	51,8	41	48,2
2.	Laporan Keuangan Pemda Takalar dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.	0	0	0	0	3	3,5	58	68,2	24	28,2
3.	Laporan Keuangan Pemda Takalar selalu disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.	0	0	0	0	15	17,6	56	65,9	14	16,5
4.	Laporan Keuangan Pemda Takalar disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.	0	0	1	1,2	12	14,1	55	64,7	17	20,0

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran)

Keterangan : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju

Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah (X₂)

Gambaran distribusi frekuensi aksebilitas laporan keuangan daerah dapat diurai pada tabel berikut :

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Aksebilitas laporan keuangan daerah

No	Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Laporan Keuangan Pemda Takalar dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.	0	0	1	1,2	9	10,6	48	56,5	27	31,8
2.	Pemda Takalar memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan.	0	0	0	0	13	15,3	42	49,4	30	35,3
3.	Masyarakat dapat mengakses Laporan Keuangan Pemda Takalar melalui internet.	0	0	13	15,3	12	14,1	47	55,3	13	15,3

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran 3)

Keterangan : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Pada indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Transparansi pengelolaan keuangan daerah

No	Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Pengelolaan Keuangan Pemda Takalar diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai	0	0	3	3,5	20	23,5	48	56,5	14	16,5
2.	Penyebarluasan laporan Keuangan Pemda Takalar telah disampaikan melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.	0	0	0	0	19	22,4	56	65,9	10	11,8
3.	Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan	0	0	0	0	17	20,0	48	56,5	20	23,5

	dengan penyusunan laporan keuangan Pemda Takalar.										
4.	Ada ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh Pemda Takalar.	0	0	0	0	6	7,1	57	67,1	22	25,9

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran 3)

Keterangan : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian
Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Item Variabel

Variabel	Item	Korelasi Item Total	R Kritis	Keterangan
Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y)	1	0,531	0,300	Valid
	2	0,552	0,300	Valid
	3	0,373	0,300	Valid
	4	0,449	0,300	Valid
Variabel Penyajian laporan keuangan daerah (X ₁)	1	0,452	0,300	Valid
	2	0,392	0,300	Valid
	3	0,349	0,300	Valid
	4	0,323	0,300	Valid
Variabel Akseibilitas laporan keuangan daerah (X ₂)	1	0,544	0,300	Valid
	2	0,508	0,300	Valid
	3	0,479	0,300	Valid

Sumber : Lampiran

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas Setiap Variabel

Nama Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y)	0.857	Reliabel
Penyajian laporan keuangan daerah (X ₁)	0.673	Reliabel
Akseibilitas laporan keuangan daerah (X ₂)	0.819	Reliabel

Sumber : Lampiran 4

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas dapat diterima dengan menggunakan reliabilitas *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Zeithaml Berry). Hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan hasil lebih besar dari 60 % (> 60 %), maka pengukuran tersebut dapat diandalkan.

Tabel 5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil Perhitungan Regresi

Model	B	Std. Error
Constanta	0,667	0,263
X ₁	0,444	0,103
X ₂	0,496	0,091

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 6. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)
Hasil Uji t

Model	t hitung	Sig
Constanta	2,534	0,001
X ₁	4,291	0,000
X ₂	5,452	0,000

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 7. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)
Hasil Uji F

Model	Sum of squares	Df	F	Sig
Regression	32,641	2	61,628	0,000
Residual	18,537	82		
Total	51,178	84		

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 8. Pengujian Secara Dominan (Uji-Beta)
Hasil Uji Beta

Model	Beta	Sig
Constanta	-	-
X ₁	0,391	0,000
X ₂	0,497	0,000

Sumber : Data Diolah, 2019

PEMBAHASAN

Pengaruh Penyajian Laporan keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Ini berarti bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan, semakin besar peluang untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa meskipun ada

hubungan positif, variabel lain mungkin lebih dominan dalam memengaruhi transparansi. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya organisasi, ketersediaan informasi, atau tingkat pemahaman pegawai tentang laporan keuangan. Oleh karena itu, meskipun penyajian laporan memiliki peran, perlu ada upaya tambahan untuk meningkatkan transparansi, seperti pelatihan bagi pegawai dan peningkatan aksesibilitas informasi bagi publik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan, sehingga dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Transparansi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif berarti bahwa ketika penyajian laporan dilakukan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan transparansi. Penyajian yang jelas dan informatif memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dengan lebih baik bagaimana keuangan daerah dikelola. Masyarakat yang memiliki akses ke laporan yang baik cenderung lebih percaya pada pengelolaan keuangan pemerintah. Meskipun ada pengaruh positif, hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah bahwa meskipun laporan keuangan disajikan dengan baik, faktor eksternal lain, seperti tingkat pendidikan masyarakat, pemahaman tentang laporan keuangan, dan budaya organisasi di pemerintahan daerah, dapat memengaruhi transparansi secara lebih signifikan. Misalnya, jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara membaca laporan keuangan, maka penyajian yang baik sekalipun tidak akan berkontribusi pada transparansi.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika laporan keuangan daerah lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, transparansi dalam pengelolaan keuangan juga meningkat. Aksesibilitas laporan keuangan merujuk pada sejauh mana informasi keuangan yang disajikan dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pejabat pemerintah, dan auditor. Aksesibilitas yang baik berarti laporan keuangan disajikan dalam format yang mudah dimengerti dan tersedia dalam waktu yang tepat.

Dengan akses yang lebih baik terhadap laporan keuangan, masyarakat akan lebih percaya bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan. Ketika masyarakat dapat melihat dan memahami bagaimana uang publik digunakan, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Aksesibilitas laporan keuangan juga berkontribusi pada akuntabilitas. Ketika informasi tersedia untuk umum, pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan finansial mereka, karena setiap tindakan dapat diawasi oleh publik.

Variabel paling dominan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

Aksesibilitas laporan keuangan mengacu pada kemudahan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan memahami informasi keuangan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas ini bisa berupa publikasi laporan keuangan yang jelas, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta ketersediaan informasi di berbagai platform. Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Dengan meningkatkan aksesibilitas, pemerintah tidak hanya memenuhi tuntutan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat akuntabilitas, dan menciptakan lingkungan yang lebih partisipatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa pengolahan data statistik untuk data penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, didapat bahwa :

1. Penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dengan nilai $t_{hitung} 4,291 > t_{tabel} 1,989$, dimana nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} dan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X_2) dengan nilai $t_{hitung} 5,452 > t_{tabel} 1,989$, dimana nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} .
2. Penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, dari pengujian menunjukkan bahwa hasil $F_{hitung} = 61,628$ lebih besar dari $F_{tabel} = 3,96$ atau bisa dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah yang paling dominan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, terbukti dari hasil nilai beta standardized yang paling besar yaitu 0,497, sedangkan variabel penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0,391.

Saran

1. Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan variabel paling dominan berpengaruh terhadap peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga disarankan kepada organisasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi dengan melakukan program pelatihan dan pendidikan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pekerjaan dan kebutuhan pegawai sehingga dengan pelatihan dan pendidikan tersebut dapat meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai demi menciptakan aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik kepada pegawai dan pemberian aksesibilitas laporan keuangan daerah secara lebih intens dan kontinue demi mencapai tujuan organisasi.
2. Organisasi bisa meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan daerah pegawai, karena aksesibilitas laporan keuangan daerah dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai.
3. Fasilitas dan kelengkapan kerja pegawai perlu diperbaiki dengan cara fasilitas kantor yang sudah tidak layak pakai diganti dengan fasilitas yang baru agar tidak menjadikan

pegawai jenuh dan merasa bosan dengan lingkungan kerja yang akhirnya akan menurunkan transparansi pengelolaan keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D, 2008. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanim, Sustika, 2009. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa)”, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Medan.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lalolo, Loina Krina P, 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____, 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, volume 2 Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 1-17.
- Mulyana, Budi, 2006. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 56.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. , Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ni Kadek Alit Apriliani I, Edy Sujana dan Gede Adi Yuniarta (2015). *Penelitian berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)*

_____, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____, Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bisnis, Cetakan kedelapan, CV Alfabet, Bandung.

Umar, Husein, 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peggy Sande, 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*.

Marjuki Sagala, 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemkab Samosir*.

Hani Nurhayani (2013). *Penelitian berjudul Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemko Bandung*.